

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Arfin dan Leonarda Sambas K, *Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2011.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dan Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.

Andreae, Fockema, *Kamus istilah Hukum*, Bandung: Binacipta, 1983.

Anderson, Ronald A, Ivan Fox, David P. Twomey, *Business Law*, Cincinnati Ohio, SouthWestern Publishing. Co, 1984.

Arfin dan Leonarda Sambas, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi (The Hunt Mega-Profits and The Attack on Democracy)*, Bayumedia Publishing, Malang 2006.

Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.

Bahrullah Akbar, *BUMN dan Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta : Prenanda Media, 2014.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013,

Bryan A. Garner, (Editor in chief), *Black's Law Dictianary*, Seventh Edition, Minim, West Pubhshing co, St Paul, 1999.

Creswell, John W., *Research Design*, Terjemahan: Ahmad Fawaid, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Erna Widjajati, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan di Indonesia*, Jakarta : Jalur, 2016.

Dwidja Priyatno dan Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2004.

Effendi, Rusli dkk, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Dalam BPHN*, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Bandung: Binacipta, 1986.

Hamzah, Andi, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta, 1984.

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1988.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I dan II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ketiga, 2001.

Hans Kelsen, Teori Hukum Murni (terjemahan dari *General Theory of Law and state*), Alih Bahasa: Somardi, Jakarta, Rindi Press, cet 1, 1995.

Honderich, Punishment: The Supposed Justifications, rev. ed., Penguin Books, Harmondsworth, 1976

Hartono, Sunarjati, *Kemungkinan Penerapan Sanksi Pidana TerhadapPraktek-praktek Bisnis Internasional*, dalam Sumantoro (Editor), *Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.

Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum PidanaIndonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hulsman, L.H.C, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif PerbandinganHukum Pidana* (Penyadur: Soedjono Dirdjosisworo), Jakarta, Rajawali Pers, 1984.

Husein Alatas, Said, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta, LP3ES, 1985

Hussiein, Harun M., *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi DanPermasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta 1994.

Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015.

I Nyoman Tjager, *Corporate Governance*, Jakarta : Prenhalindo, 2003.

Indra Surya & van Yustiavanda, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak istimewa demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Kencana & LKPMK FH UI, 2006, hal. 69.

James A. Caporaso dan David P. Levine, *Teori-Teori Ekonomi Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Mata Pena Institut, 2008, hal. 37.

Karl O. Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7, Tokyo: UNAFEI, 1974, hal. 69.

James A. Caporaso dan David P. Levine, *Teori-Teori Ekonomi Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Mata Pena Institut, 2008.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Rreformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Komputer, 2008.

Karl O. Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7, Tokyo: UNAFEI, 1974.

Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Berbagai Konvensi Internasional*, Buku Tiga, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017 .

Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II. Disusun oleh I. Wangsa Widjaja Mutia R Swasono,. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.Tbk, 2002.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ketiga, 2001.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2019.

Muchayat, *Badan Usaha Milik Negara : Retorika, Dinamika Dan Realita Menuju BUMN yang Berdaya Saing*, Surabaya: Gagasan Bisnis, 2010.

Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

Otto Ekstein, *Keuangan Negara*, Jakarta: Bina Aksana, 1981.

Partomuan Pohan. *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Purwaning Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Bandung ; PT Alumni, 2015.

Prasetyo, *Dilema BUMN*, Jakarta : Rayyana Komunika Sindo, 2014.

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum ional Code, dalam: Stanley E. Grupp, Theories of Punishment*, 1971.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sue Titus Reid, *Criminal Justice, Procedures and Issues*, West Publishing Company, New York, 1987.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Victorianus dan Randa Puang, *Filsafat Hukum Sub-Cabang Filsafat Umum*, Jakarta:PT. Sofmedia.

Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Bandung:  
Alumni, 2013.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta:PT. Grasindo, 2006.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan  
Pendapat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Perpu Nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

### **C. Sumber Lainnya**

Bambang Sugiri, “Pertanggungjawaban Pidana Direksi Bumh Yang Berbentuk Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bumh” *Jurnal*, Malang: Universitas Brawijaya, 2015.

Eddy Rifa, Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Mimbar Hukum*, [Vol 26, No. 1 2014](#).

Eddy Os Hiariej, Pengembalian Aset Kejahatan, *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 13 Mei 2013.

Forum Keadilan (Majalah Dwi Mingguan) Nomor 16, Februari 1990.

Henry Donald Lbn. Toruan, Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi (*Corruption Corporate Criminal Liability*), *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 3 Nomor 3, Desember 2014.

Jamin Ginting, Faktor Hukum dan Non Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Media Indonesia*, Volume 19, Nomor 2, 2012.

Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, [Vol 44, No 4 2014](#).

Molly Cheang, *Disparity of sentencing*, *Singapore Malaya Law Journal*, PTE Ltd., 1977.

Roni Saputra, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK), *Jurnal Cita Hukum*, [Vol 3, No. 2 2015](#).

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Sri Edi Swasono Menjadi Tuan di Negeri Sendiri, *Kompas*, 24 September 2013.

**D. Wawancara**

Wawancara dengan Kadek Suartama by Aplikasi Zoom tanggal 27 Maret 2021

**E. Internet**

<https://translationpapersbali.com/2013/09/30/istilah-istilah-peradilan-judicial-terms-ri/>, diakses tanggal 22 Desember 2020, Pukul 11.14 WIB.

